Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume. 4, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN :2988-134X ; p-ISSN :2988-148X; Hal. 109-129
DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v4i4.3535
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Determinan Sosial-Ekonomi terhadap Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2020-2025: Pendekatan Regresi Data *Panel Fixed Effect*

Muhammad Akhil Ilham[1*], Etik Umiyati[2], Dwi Hastuti[3]
[1-3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia
Email: akhililham10@gmail.com[1], dwihastuti@unja.ac.id[2], etik_umiyati@unja.ac.id[3]

**Penulis Korespondensi: akhililham10@gmail.com*

Abstract*. Income inequality remains a persistent development challenge in resource-based regions such as Jambi Province, where economic activity is dominated by capital-intensive oil palm plantations and coal mining. Although the provincial Gini Index is relatively low, this aggregate figure may conceal disparities among regencies and cities. This study aims to describe the development of the Gini Index and its socio-economic determinants and to analyze the effects of education level (mean years of schooling), total population, the open unemployment rate, per capita expenditure, and economic growth on the Gini Index across 11 regencies and cities in Jambi Province during 2020-2025. A quantitative approach was applied using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), arranged as a balanced panel of 66 observations. The Chow and Hausman tests selected the fixed effect model as the most appropriate estimator, and classical assumption tests indicated no serious problems of normality, multicollinearity, or heteroscedasticity. The results show that total population has a negative and significant effect on the Gini Index, whereas per capita expenditure and economic growth have positive and significant effects. Education level and the open unemployment rate have negative but statistically insignificant effects. Jointly, the five variables significantly affect the Gini Index, with an adjusted R-squared of 61.08 percent. These findings imply that growth driven by capital-intensive sectors has not yet been inclusive. Regional governments are therefore encouraged to promote labor-intensive downstream industries, targeted social protection, support for micro and small enterprises, and closer alignment between vocational education and labor market needs.*

Keywords*: Economic Growth; Fixed Effect Model; Gini Index; Per Capita Expenditure; Total Population*.

Abstrak. Ketimpangan pendapatan tetap menjadi tantangan pembangunan di wilayah berbasis sumber daya alam seperti Provinsi Jambi, yang perekonomiannya didominasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang padat modal. Meskipun Indeks Gini provinsi tergolong rendah, angka agregat tersebut berpotensi menyembunyikan kesenjangan antar Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan Indeks Gini beserta determinan sosial-ekonominya serta menganalisis pengaruh tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran per kapita, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Gini di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi periode 2020-2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder Badan Pusat Statistik yang disusun sebagai panel seimbang berjumlah 66 observasi. Uji Chow dan uji Hausman memilih *Fixed Effect Model* sebagai estimator terbaik, dan uji asumsi klasik menunjukkan tidak ada masalah serius pada normalitas, multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini, sedangkan pengeluaran per kapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap Indeks Gini dengan koefisien determinasi terkoreksi sebesar 61,08 persen. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan yang ditopang sektor padat modal belum inklusif. Pemerintah daerah perlu mendorong hilirisasi padat karya, perlindungan sosial tepat sasaran, penguatan usaha mikro dan kecil, serta keselarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Kata Kunci: Indeks Gini; Jumlah Penduduk; Pengeluaran Per Kapita; Pertumbuhan Ekonomi; *Model Fixed Effect*.

Naskah Masuk: 14 Agustus 2026; Revisi: 11 September 2026; Diterima: 08 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan menggambarkan pembagian pendapatan yang tidak proporsional di antara rumah tangga dalam suatu perekonomian (Restulillah & Ariusni, 2020). Isu ini menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan global, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), karena distribusi pendapatan yang merata dipandang sebagai prasyarat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat signifikan selama beberapa dekade, upaya mencapai distribusi kesejahteraan yang inklusif masih menjadi persoalan krusial (Hill, 2021). Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menurunkan ketimpangan tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran di setiap wilayah (Farkhan & Maryani, 2023), sehingga dinamika ketimpangan dipengaruhi oleh kombinasi pertumbuhan ekonomi, struktur pekerjaan, dan kebijakan redistribusi daerah (Nabila & Laut, 2021).

Indeks Gini merupakan ukuran umum ketimpangan pendapatan, baik di tingkat nasional maupun wilayah (Utami & Zahrudin, 2022). Indeks ini menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan atau konsumsi menyimpang dari distribusi yang sama rata (Lyu et al., 2025). Nilainya berkisar dari 0 yang berarti kesetaraan sempurna hingga 1 yang berarti seluruh pendapatan terkonsentrasi pada satu pihak; nilai 0,2-0,3 umumnya dianggap rendah, sedangkan nilai di atas 0,5 dianggap sangat tinggi (Aryal & Aryal, 2023). Secara nasional, Badan Pusat Statistik (2026) mencatat Indeks Gini pengeluaran Indonesia sebesar 0,363 pada September 2025. Provinsi Jambi mencatat 0,315 pada September 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2025) dan, menurut data BPS yang diolah penulis, 0,291 pada September 2025, yang menempatkannya pada urutan kelima tertinggi di antara sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, tingkat ketimpangan antar wilayah bervariasi, dan Jambi kerap disebut memiliki ketimpangan relatif lebih tinggi karena konvergensi pembangunan yang belum merata (Hidayat, 2023). Studi regional menunjukkan bahwa dinamika Indeks Gini di Sumatera dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan manusia, tetapi arah dan signifikansinya berbeda antar wilayah dan antar periode (Aqilah et al., 2024; Ghifara et al., 2022; Mardhian et al., 2023). Julihanza & Khoirudin (2023) menemukan bahwa lonjakan pertumbuhan dapat memperlebar jurang pendapatan apabila investasi dan infrastruktur terkonsentrasi pada klaster wilayah tertentu, sementara Ningtiyas & Dwiputri (2021) mengidentifikasi kerentanan disparitas yang relatif lebih tinggi di kawasan tengah Sumatera.

Struktur perekonomian Provinsi Jambi termasuk unik karena didominasi industri padat modal, terutama perkebunan kelapa sawit skala besar dan pertambangan batu bara. Ekspansi kedua sektor tersebut mendorong produk domestik regional bruto (PDRB) secara signifikan,

tetapi nilai tambahnya cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal dan tenaga kerja terampil, sedangkan daya serap tenaga kerja lokal lebih terbatas dibandingkan sektor padat karya. Kondisi ini berisiko membentuk ekonomi enklave, yaitu pertumbuhan tinggi yang tidak menetes ke lapisan bawah (*trickle-down effect*) secara memadai. Pada saat yang sama, kualitas manusia membaik: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi mencapai 75,13 pada tahun 2025 sehingga masuk kategori tinggi, dan jumlah penduduk terus bertambah. Paradoks antara membaiknya kualitas penduduk dan pertumbuhan berbasis modal yang berpotensi memperlebar jurang pendapatan antar wilayah menjadikan Jambi kasus yang relevan untuk dikaji.

Angka Indeks Gini provinsi merupakan nilai agregat yang berpotensi menimbulkan bias agregasi karena menyembunyikan ketimpangan spasial antar Kabupaten/Kota. Kabupaten berbasis perkebunan dan pertambangan, seperti Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, memiliki struktur ketimpangan yang berbeda dari pusat jasa dan perdagangan seperti Kota Jambi. Selain itu, BPS mengukur Indeks Gini berdasarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, bukan pendapatan riil, sehingga koefisien yang dihasilkan cenderung lebih rendah daripada ketimpangan pendapatan sesungguhnya karena kelompok berpendapatan tinggi menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Temuan empiris pun belum seragam. Violin & Lutfi (2022) serta Alamanda (2021) melaporkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap Indeks Gini, sedangkan Sulistyaningrum et al. (2022) serta Julihanza & Khoirudin (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi. Di Kawasan Timur Indonesia, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menurunkan ketimpangan, tetapi efektivitasnya bergantung pada cara kebijakan intervensi menyalurkan manfaat pembangunan (Amaluddin et al., 2020).

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada cakupan nasional, Pulau Jawa, atau data agregat tingkat provinsi, sehingga analisis data panel yang secara eksplisit membedah 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi masih sangat terbatas (Yulianingdyah, 2022). Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui tiga kebaruan. Pertama, analisis dilakukan pada level Kabupaten/Kota dengan data terbaru hingga tahun 2025 yang mencakup pemulihan pasca pandemi dan fluktuasi harga komoditas. Kedua, pengeluaran per kapita sebagai proksi konsumsi riil dipadukan dengan variabel pendidikan, kependudukan, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi dalam satu model panel. Ketiga, model diestimasi dengan pendekatan efek tetap yang mengendalikan heterogenitas wilayah. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan Indeks Gini, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran per kapita, dan pertumbuhan ekonomi

di Provinsi Jambi tahun 2020-2025, serta menganalisis pengaruh kelima variabel penjelas tersebut terhadap Indeks Gini guna menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pemerintah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Todaro & Smith (2012) memaknai ketimpangan pendapatan sebagai alokasi pendapatan domestik yang tidak proporsional di antara rumah tangga, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan, tetapi juga oleh keadilan distribusi hasilnya. Menurut Jhingan (2014), ketimpangan distribusi merupakan konsekuensi perbedaan kepemilikan faktor produksi dan perbedaan pendapatan yang diterima pemiliknya, sedangkan Sidqiy & Amar (2020) menekankan peran keterbatasan peluang kerja dan rendahnya ketahanan ekonomi. Distribusi pendapatan dapat dilihat dari sisi perorangan (*size distribution*) maupun fungsional, dan pola penyebarannya digambarkan melalui Kurva Lorenz. Indeks Gini dihitung sebagai rasio luas area di antara garis kesetaraan sempurna dan Kurva Lorenz terhadap luas segitiga di bawah garis tersebut. Berdasarkan pengategorian BPS, nilai di bawah 0,30 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,30-0,50 sedang, dan nilai di atas 0,50 tinggi.

Hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan dijelaskan oleh hipotesis U-terbalik Kuznets. Pada fase awal pertumbuhan, ketimpangan cenderung melebar karena transformasi struktural memindahkan tenaga kerja dari sektor agraris berpendapatan rendah ke sektor modern yang mula-mula hanya dinikmati sebagian kelompok, dan ketimpangan menyusut pada fase berikutnya (Todaro & Smith, 2012). Jhingan (2014) menambahkan bahwa penurunan pada tahap lanjut dimungkinkan oleh perluasan akses pendidikan, peningkatan keterampilan, serta intervensi pemerintah melalui perpajakan dan jaminan sosial. Bukti empiris lintas negara menegaskan bahwa hubungan ini tidak seragam. Alamanda (2021) menemukan pengaruh pertumbuhan terhadap ketimpangan dalam analisis panel lima puluh negara, Asogwa et al. (2021) menguji peran indikator makroekonomi di sejumlah negara Afrika, dan Liu et al. (2024) mengaitkan ketimpangan spasial multidimensi di Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks daerah, Khusaini et al. (2024) menunjukkan bahwa transfer fiskal dan infrastruktur jalan berperan mengurangi ketimpangan desa-kota, dan Sarjito (2024) menelaah efektivitas kebijakan sosial dalam menekan ketimpangan dan kemiskinan.

Teori modal manusia yang dipelopori Becker memandang pendidikan sebagai investasi produktif yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas, sehingga lulusan berpendidikan lebih tinggi berpeluang memperoleh pekerjaan dan upah yang lebih baik (Todaro & Smith, 2012). Jhingan (2014) menegaskan peran ganda pendidikan: sebagai

penggerak mobilitas vertikal ke sektor modern, tetapi juga sebagai sumber ketimpangan apabila akses dan kualitasnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dampak investasi modal manusia bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kebijakan kesehatan dasar, distribusi tenaga kerja, serta infrastruktur (Hutami & Riani, 2022). Karena itu, ketimpangan modal manusia dan disparitas capaian pendidikan berkaitan dengan disparitas distribusi pendapatan (Aqil & Wahyuniati, 2022; Lutfiani & Yuniasih, 2021). Secara teoretis, peningkatan rata-rata lama sekolah diharapkan menurunkan Indeks Gini.

Jumlah penduduk memengaruhi Indeks Gini melalui urbanisasi, migrasi, kapasitas manusia, dan distribusi peluang kerja, sehingga efeknya sangat bergantung pada konteks pembangunan dan kebijakan redistribusi (Ariesta et al., 2022). Jhingan (2014) memandang penduduk sebagai beban apabila berkualitas rendah dan melampaui kapasitas ekonomi, tetapi sebagai modal pembangunan apabila terserap dalam aktivitas produktif. Lailani & Maulida (2022) menunjukkan bahwa pendapatan dan jumlah penduduk membentuk tingkat konsumsi rumah tangga, yang merupakan basis pengukuran Indeks Gini oleh BPS. Dengan demikian, arah pengaruh jumlah penduduk bersifat terbuka dan harus diuji secara empiris.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, dan menjadi cerminan keseimbangan pasar tenaga kerja daerah (Prayitno & Kusumawardani, 2022). Teori makroekonomi menyatakan bahwa kenaikan pengangguran menghilangkan sumber pendapatan rumah tangga sehingga memperburuk distribusi pendapatan (Sukirno, 2015). Namun, hubungan ini dapat teredam oleh sektor informal dan jaring pengaman keluarga yang mampu menyerap angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal. Pengeluaran per kapita merepresentasikan tingkat konsumsi dan daya beli. Berdasarkan teori konsumsi Keynesian, konsumsi merupakan fungsi pendapatan, dan kelompok berpendapatan tinggi menyisihkan porsi pendapatan yang lebih besar untuk tabungan dibandingkan kelompok bawah yang membelanjakan hampir seluruh pendapatannya untuk kebutuhan dasar (Aryal & Aryal, 2023; Sukirno, 2015). Peningkatan pengeluaran yang tidak merata dengan demikian dapat memperlebar disparitas antar kelompok, dan kerentanan ekonomi rumah tangga di Sumatera pun sangat dipengaruhi oleh pola pengeluaran konsumsi (Nugroho & Salsabila, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, Abdullah et al. (2021) dan Bustos & Arango (2021) melaporkan bahwa perluasan pendidikan berperan mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan Sulistyaningrum et al. (2022) serta Violin & Lutfi (2022) menemukan pengaruh yang tidak selalu signifikan. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pada studi Aqilah et al. (2024) dan Walujadi et al. (2022), tetapi berpengaruh

positif pada studi lain. Tingkat pengangguran tidak signifikan dalam penelitian Khaerunnisa & Puspitasari (2023) dan sejalan dengan temuan Ghifara et al. (2022) serta Fitriyani et al. (2024). Pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap Indeks Gini pada studi Falahuddin et al. (2024), Taş (2022), dan Janah (2022), sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada studi Nabila & Laut (2021) serta Wijayanti & Putri (2023). Ragam temuan tersebut membentuk ekspektasi penelitian ini: pendidikan cenderung menekan Indeks Gini, arah pengaruh jumlah penduduk terbuka, pengangguran cenderung memperlebar ketimpangan, sedangkan pengeluaran per kapita dan pertumbuhan ekonomi dapat memperlebarnya apabila manfaatnya tidak terdistribusi inklusif. Kelima variabel diharapkan berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Gini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji pengaruh variabel penjelas terhadap Indeks Gini. Struktur data berupa data panel, yaitu gabungan data lintas ruang (*cross section*) dan deret waktu (*time series*), yang mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Jambi, yakni 9 kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo) serta 2 kota (Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh) selama enam tahun pengamatan, 2020-2025. Seluruh populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh panel seimbang dengan 66 observasi. Panel data dipilih karena menghasilkan derajat bebas yang lebih besar, memungkinkan pengamatan perubahan lintas wilayah dan waktu, serta dapat mengendalikan karakteristik unik tiap wilayah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Variabel terikat adalah Indeks Gini, sedangkan variabel bebas meliputi rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai proksi tingkat pendidikan, jumlah penduduk (JP), tingkat pengangguran terbuka (TPT), pengeluaran per kapita (PPK), dan pertumbuhan ekonomi (PE) yang diproksikan dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Definisi dan satuan variabel disajikan pada Tabel 1. Agar skala koefisien mudah ditafsirkan, jumlah penduduk dinyatakan dalam ribu jiwa, pengeluaran per kapita dalam juta rupiah per bulan, dan PDRB ADHK dalam triliun rupiah.

Tabel 1. Definisi Operasional Dan Satuan Variabel Penelitian.

Variabel	Definisi Operasional	Satuan Asal	Satuan Model
Indeks Gini (IG)	Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten/Kota (0 = merata sempurna; 1 = timpang sempurna)	Indeks 0-1	Indeks 0-1
Pendidikan (RLS)	Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal	Tahun	Tahun
Jumlah penduduk (JP)	Jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah, termasuk yang menetap minimal enam bulan	Jiwa	Ribu jiwa
Pengangguran (TPT)	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha	Persen	Persen
Pengeluaran per kapita (PPK)	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan dan bukan makanan	Rupiah	Juta rupiah
Pertumbuhan ekonomi (PE)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan sebagai proksi ekspansi output riil daerah	Miliar rupiah	Triliun rupiah

Sumber: BPS Provinsi Jambi dan definisi operasional penelitian (data diolah, 2026).

Perkembangan variabel dianalisis secara deskriptif menggunakan laju perkembangan tahunan pada Persamaan (1), yang dihitung dari selisih nilai variabel wilayah ke-i pada tahun ke-t terhadap nilai tahun sebelumnya, dibagi nilai tahun sebelumnya, dan dikalikan 100 persen.

$$PX_{it} = (X_{it} - X_{i,t-1}) / X_{i,t-1} \times 100\% \quad \text{(I)}$$

Pengaruh variabel bebas terhadap Indeks Gini dianalisis dengan regresi data panel menggunakan EViews 14. Model umum ditunjukkan pada Persamaan (2), dengan IG adalah Indeks Gini, RLS adalah rata-rata lama sekolah, JP yaitu jumlah penduduk, TPT sendiri ialah tingkat pengangguran terbuka, PPK yakni pengeluaran per kapita, dan PE merupakan pertumbuhan ekonomi, β_0 konstanta, β_1 sampai β_5 koefisien regresi, ε galat, i indeks Kabupaten/Kota, dan t indeks tahun.

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLS_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PPK_{it} + \beta_5 PE_{it} + \varepsilon_{it} \quad \text{(II)}$$

Terdapat tiga pendekatan estimasi, yaitu *Common Effect Model* (CEM) yang menggabungkan seluruh data dengan *Ordinary Least Squares*, *Fixed Effect Model* (FEM) yang memberikan intersep spesifik bagi setiap wilayah dan diestimasi dengan *Least Squares Dummy Variables*, serta *Random Effect Model* (REM) yang memasukkan perbedaan antar wilayah ke dalam galat dan diestimasi dengan *Generalized Least Squares* (Gujarati & Porter, 2009). Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk membandingkan FEM dan REM, serta uji *Lagrange Multiplier* apabila pilihan antara CEM dan REM masih diperlukan. Apabila FEM terpilih, spesifikasi model mengikuti Persamaan (3) dengan α_i sebagai intersep spesifik Kabupaten/Kota ke-i.

$$IG_{it} = \alpha_i + \beta_1 RLS_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PPK_{it} + \beta_5 PE_{it} + \varepsilon_{it} \quad \text{(III)}$$

Kelayakan model diuji dengan asumsi klasik, yaitu uji normalitas *Jarque-Bera* pada residual, uji multikolinearitas melalui korelasi berpasangan antar variabel bebas dengan batas 0,80, uji heteroskedastisitas *Glejser*, dan uji autokorelasi *Durbin-Watson* (Gujarati & Porter, 2009). Pengujian hipotesis menggunakan uji F untuk pengaruh simultan, uji t untuk pengaruh parsial, dan koefisien determinasi terkoreksi (*adjusted* R^2) untuk kemampuan model menjelaskan variasi Indeks Gini, seluruhnya pada taraf signifikansi 5 persen. Karena metode-metode tersebut sudah lazim, uraian rumus tidak dirinci lebih lanjut dan hasilnya langsung diinterpretasikan pada bagian berikutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dari publikasi BPS Provinsi Jambi untuk 11 Kabupaten/Kota selama periode 2020-2025 dan diolah pada tahun 2026. Hasil deskriptif dan estimasi disajikan dalam bentuk tabel dan gambar hasil pengolahan penulis, bukan data mentah maupun tangkapan layar perangkat lunak, kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu.

Perkembangan Indeks Gini dan Variabel Sosial-Ekonomi

Tabel 2 merangkum rata-rata tahunan seluruh variabel pada 11 Kabupaten/Kota, sedangkan Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif panel. Selama 2020-2025, rata-rata Indeks Gini berfluktuasi pada kisaran 0,285-0,324 dan turun 4,80 persen secara keseluruhan. Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah naik 6,27 persen, jumlah penduduk naik 6,20 persen, pengeluaran per kapita naik 30,28 persen, dan PDRB ADHK naik 24,87 persen, sedangkan TPT turun 16,22 persen. Arah perkembangan ini menunjukkan perbaikan indikator sosial-ekonomi, namun rentang antar wilayah pada Tabel 3 memperlihatkan disparitas yang lebar, misalnya rata-rata lama sekolah 6,70-11,59 tahun dan PDRB ADHK Rp4,6-36,3 triliun.

Tabel 2. Rata-Rata Tahunan Variabel Penelitian Pada 11 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, 2020-2025.

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perubahan (%)
Indeks Gini	0,299	0,296	0,298	0,324	0,295	0,285	-4,80
RLS (tahun)	8,40	8,50	8,57	8,68	8,82	8,92	+6,27
JP (jiwa)	322.582	325.927	330.109	334.469	338.572	342.590	+6,20
TPT (persen)	4,67	4,45	3,99	4,07	4,14	3,91	-16,22
PPK (rupiah/bulan)	1.110.024	1.148.383	1.241.309	1.402.801	1.427.853	1.446.188	+30,28
PE/PDRB ADHK (miliar rupiah)	13.540	14.006	14.730	15.415	16.113	16.907	+24,87

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah, 2026). Perubahan dihitung antar a 2020 dan 2025.

Secara umum, perkembangan variabel penelitian memperlihatkan tren yang dinamis antar wilayah dan antar waktu. Guna memahami pemusatan serta penyebaran data dari seluruh sampel observasi (N = 66), gambaran statistik deskriptif masing-masing variabel disajikan pada Tabel 3 berikut.

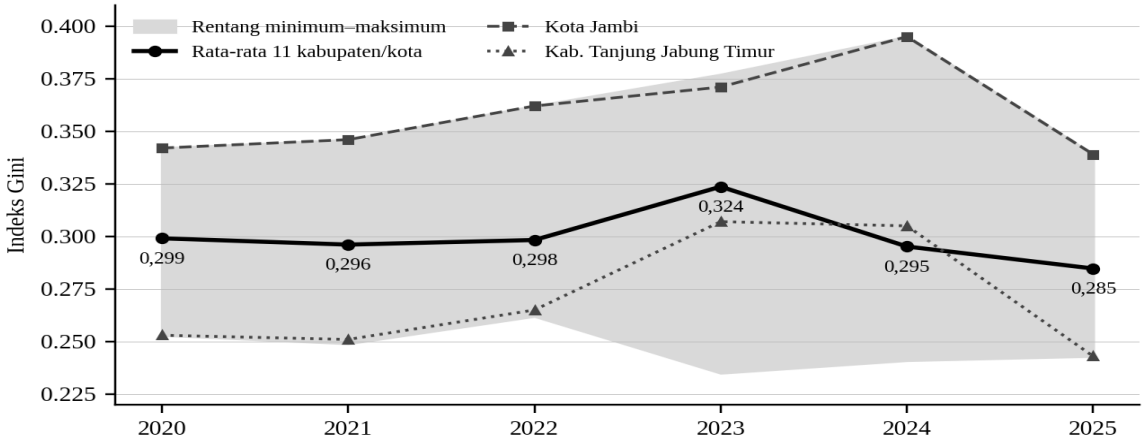
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 66).

Variabel	Rata-Rata	Simpangan Baku	Minimum	Maksimum
Indeks Gini	0,299	0,035	0,235	0,395
RLS (tahun)	8,65	1,15	6,70	11,59
JP (jiwa)	332.375	124.116	96.600	642.260
TPT (persen)	4,21	2,02	1,32	10,66
PPK (rupiah/bulan)	1.296.093	247.119	938.592	2.122.022
PE/PDRB ADHK (miliar rupiah)	15.118,52	7.399,38	4.600,23	36.327,66

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah, 2026).

Perkembangan Indeks Gini

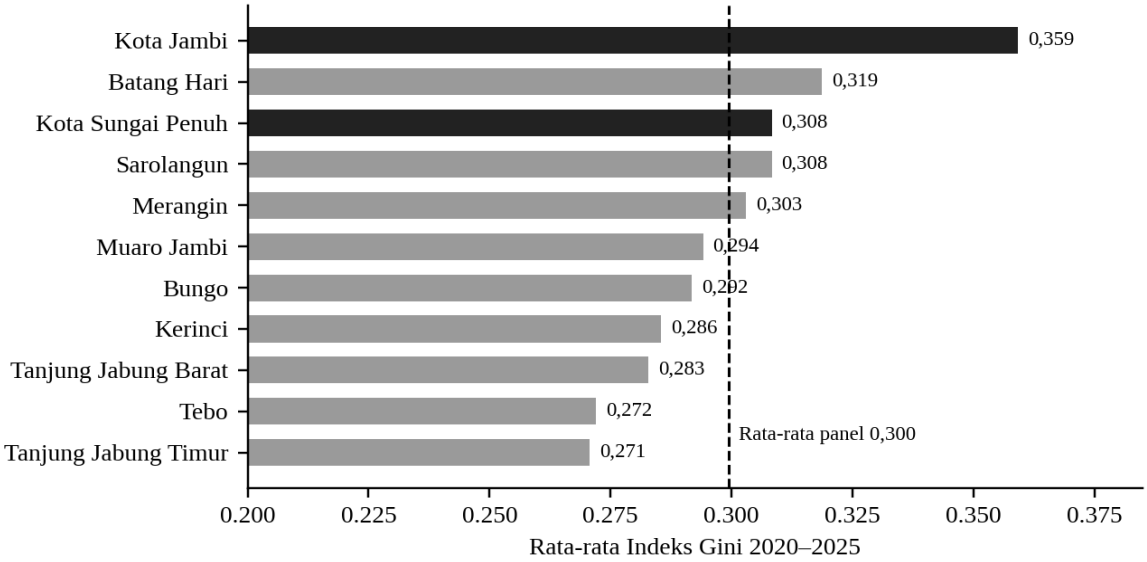
Gambar 1 memperlihatkan bahwa rata-rata Indeks Gini Kabupaten/Kota relatif stabil pada 2020-2022 (0,296-0,299), memuncak pada 2023 (0,324), kemudian menurun hingga 0,285 pada 2025. Gambar 2 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki rata-rata Indeks Gini tertinggi (0,359) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendah (0,271). Indeks Gini Kota Jambi meningkat dari 0,342 pada 2020 hingga 0,395 pada 2024, nilai tertinggi dalam panel, sebelum turun menjadi 0,339 pada 2025. Adapun nilai terendah dalam panel tercatat di Kabupaten Tebo pada 2023 (0,235), dan Tanjung Jabung Timur mencapai 0,243 pada 2025. Kabupaten Merangin dan Sarolangun mengalami fluktuasi tajam antar tahun, misalnya Merangin dari 0,362 pada 2023 menjadi 0,241 pada 2024, yang menunjukkan bahwa indikator ini relatif sensitif terhadap perubahan distribusi konsumsi pada level kabupaten.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2025.

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah, 2026).

Tingginya ketimpangan di Kota Jambi sejalan dengan karakter pusat pertumbuhan berbasis jasa dan perdagangan, tempat akumulasi modal dan keragaman jenis pekerjaan melebarkan jarak pendapatan antar lapisan masyarakat. Sebaliknya, daerah berbasis pertanian dan perkebunan cenderung memiliki struktur pendapatan yang lebih merata. Nilai Indeks Gini seluruh wilayah pada 2025 berada pada kategori rendah hingga sedang, sehingga tren penurunan pada tahun terakhir mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi dan program redistribusi mulai berdampak pada pengurangan ketimpangan.



Gambar 2. Rata-rata Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2025.

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah, 2026).

Perkembangan Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Pengangguran

Rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi naik dari 8,55 tahun pada 2020 menjadi 8,95 tahun pada 2025, sejalan dengan kenaikan nasional dari 8,48 menjadi 9,07 tahun. Capaian tertinggi konsisten dicatat wilayah perkotaan, yaitu Kota Jambi (10,92 tahun pada 2020 menjadi 11,59 tahun pada 2025) dan Kota Sungai Penuh (10,75 tahun pada 2025), sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendah meskipun menunjukkan kenaikan terpesat dari 6,70 menjadi 7,71 tahun. Perbedaan ini berakar pada ketersediaan infrastruktur pendidikan, struktur demografi, dan karakter ekonomi daerah, sehingga kota sebagai pusat jasa dan pemerintahan memiliki aksesibilitas pendidikan menengah dan tinggi yang lebih baik. Selain itu, ketimpangan capaian pendidikan antar wilayah ini mengimplikasikan adanya variasi kualitas sumber daya manusia dalam menyerap peluang kerja bernilai tambah tinggi. Akibatnya, akumulasi modal manusia (*human capital*) yang belum merata berpotensi mempertahankan jurang pendapatan masyarakat, terutama antara wilayah perkotaan yang berbasis sektor jasa dan perdagangan dengan wilayah rural yang masih didominasi oleh sektor pertanian primer.

Jumlah penduduk Provinsi Jambi bertambah dari 3.548.230 jiwa pada 2020 menjadi 3.768.480 jiwa pada 2025, atau sekitar 1,2 persen per tahun menurut perhitungan penulis. Konsentrasi terbesar berada di Kota Jambi (606.200 jiwa pada 2020 dan 642.260 jiwa pada 2025), diikuti Kabupaten Muaro Jambi (430.250 jiwa pada 2025) sebagai wilayah penyangga yang menerima limpahan permukiman dan kawasan industri Kota Jambi. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Kota Sungai Penuh (101.920 jiwa pada 2025). TPT provinsi menurun dari 5,13 persen menjadi 4,26 persen, sejalan dengan penurunan nasional dari 7,07 persen menjadi 4,85 persen pasca pandemi COVID-19. TPT tertinggi konsisten berada di Kota Jambi (10,49 persen pada 2020 dan 7,08 persen pada 2025), yang berkaitan dengan persaingan angkatan kerja perkotaan dan ketidaksesuaian kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, sedangkan kabupaten agraris seperti Tanjung Jabung Timur (2,00 persen) dan Tebo (2,21 persen) mencatat TPT rendah karena sektor informal dan usaha keluarga menyerap tenaga kerja secara fleksibel, meskipun dapat disertai pengangguran terselubung.

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi meningkat dari Rp1.126.690 per bulan pada 2020 menjadi Rp1.726.800 pada 2025, lebih tinggi daripada capaian nasional yang naik dari Rp1.225.684 menjadi Rp1.569.088. Kota Jambi tertinggi, dari Rp1.563.595 pada 2020 hingga puncak Rp2.122.022 pada 2024 sebelum menjadi Rp1.995.087 pada 2025, sedangkan Kabupaten Tebo terendah pada 2025 (Rp1.201.008). Sektor perkebunan yang bergantung pada harga kelapa sawit dan karet membuat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di kabupaten lebih rentan terhadap volatilitas harga komoditas.

PDRB ADHK Provinsi Jambi naik dari Rp148.354,25 miliar pada 2020 menjadi Rp185.582,21 miliar pada 2025, atau sekitar 4,6 persen per tahun menurut perhitungan penulis. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki output terbesar (Rp30.654,42 miliar pada 2020 dan Rp36.327,66 miliar pada 2025), didorong industri pengolahan, pertambangan migas, dan perkebunan kelapa sawit skala besar yang padat modal, sedangkan Kota Sungai Penuh terkecil (Rp4.600,23 miliar menjadi Rp5.736,72 miliar) akibat keterbatasan wilayah produktif. Ekspansi PDRB yang konsisten di seluruh wilayah menandakan daya tahan ekonomi yang kuat, tetapi struktur padat modal tersebut menjadi kunci untuk memahami hasil regresi berikut.

Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Pemilihan Model Estimasi

Tabel 4 menunjukkan hasil uji penentuan model. Uji Chow menghasilkan statistik F sebesar 4,3786 dengan probabilitas 0,0002 dan statistik *Chi-square* sebesar 41,5134 dengan probabilitas 0,0000, keduanya di bawah 0,05, sehingga FEM lebih tepat daripada CEM. Uji

Hausman menghasilkan statistik *Chi-square* 28,9889 dengan probabilitas 0,0000, yang berarti FEM juga lebih baik daripada REM karena efek spesifik wilayah berkorelasi dengan variabel bebas. Dengan terpilihnya FEM pada kedua uji tersebut, uji *Lagrange Multiplier* tidak diperlukan.

Tabel 4. Hasil Uji Penentuan Model Regresi Data Panel.

Uji	Statistik	d.f.	Prob.	Keputusan
Chow (*Cross-section F*)	4,3786	(10; 50)	0,0002	FEM lebih baik dari CEM
Chow (*Cross-section Chi-square*)	41,5134	10	0,0000	FEM lebih baik dari CEM
Hausman (*Cross-section random*)	28,9889	5	0,0000	FEM lebih baik dari REM

Sumber: EViews 14 (data diolah, 2026).

Uji Asumsi Klasik

Ringkasan uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 5. Nilai *Jarque-Bera* sebesar 3,5897 dengan probabilitas 0,1662 (di atas 0,05) menunjukkan residual berdistribusi normal. Korelasi berpasangan tertinggi antar variabel bebas terdapat pada RLS dan PPK sebesar 0,7749 yang masih di bawah batas 0,80, sehingga tidak ada multikolinearitas serius. Uji Glejser menghasilkan probabilitas seluruh variabel di atas 0,05, dengan nilai terkecil pada PE sebesar 0,0562 yang berada tepat di atas batas sehingga perlu dicermati, dan statistik *Durbin-Watson* sebesar 2,1651 mendekati 2 sehingga tidak ditemukan autokorelasi. Dengan demikian, model FEM memenuhi asumsi klasik dan layak diinterpretasikan. Pemenuhan seluruh asumsi klasik ini sangat krusial dalam analisis ekonometrika untuk memastikan bahwa estimator *Fixed Effect Model* (FEM) bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Terbebaskannya model dari masalah autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas berat menjamin bahwa galat baku (*standard error*), statistik t, serta nilai koefisien determinasi yang dihasilkan tidak bias dan shahih secara statistik. Dengan demikian, pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel sosio-ekonomi terhadap Indeks Gini memiliki tingkat validitas ilmiah yang tinggi untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik.

Uji	Statistik Utama	Kriteria	Keputusan
Normalitas (*Jarque-Bera*)	JB = 3,5897; Prob. = 0,1662	Prob. > 0,05	Residual normal
Multikolinearitas (korelasi berpasangan)	r maksimum = 0,7749 (RLS-PPK)	r < 0,80	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas (*Glejser*)	Prob. terkecil = 0,0562 (PE)	Prob. > 0,05	Homoskedastis
Autokorelasi (*Durbin-Watson*)	DW = 2,1651	Mendekati 2	Tidak ada autokorelasi

Sumber: EViews 14 (data diolah, 2026).

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 6 menyajikan hasil estimasi FEM. Persamaan yang diperoleh adalah sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (4), dengan α_i sebagai intersep Kabupaten/Kota ke-i (rata-rata intersep sebesar 1,9759).

$$IG_{it} = \alpha_i - 0{,}0230\ RLS_{it} - 0{,}0059\ JP_{it} - 0{,}0045\ TPT_{it} + 0{,}1792\ PPK_{it} + 0{,}0171\ PE_{it} \quad (4)$$

Tabel 6. Hasil estimasi Fixed Effect Model (variabel terikat: Indeks Gini).

Variabel	Koefisien	Galat baku	t-statistik	Prob.	Keputusan (α = 5%)
Konstanta	1,975870	0,381024	5,185682	0,0000	Signifikan
RLS (tahun)	-0,023010	0,023370	-0,984557	0,3296	Tidak signifikan
JP (ribu jiwa)	-0,005865	0,001585	-3,700164	0,0005	Signifikan
TPT (persen)	-0,004522	0,005915	-0,764546	0,4481	Tidak signifikan
PPK (juta rupiah)	0,179242	0,033731	5,313774	0,0000	Signifikan
PE (miliar rupiah)	0,017098	0,007605	2,248082	0,0290	Signifikan

Sumber: EViews 14 (data diolah, 2026). R^2 = 0,7006; adjusted R^2 = 0,6108; F-statistik = 7,8012 (Prob. = 0,0000); Durbin-Watson = 2,1651; N = 66.

Uji Simultan Dan Koefisien Determinasi

Statistik F sebesar 7,8012 dengan probabilitas 0,0000 (di bawah 0,05) menunjukkan bahwa RLS, jumlah penduduk, TPT, pengeluaran per kapita, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Gini di 11 Kabupaten/Kota, sehingga model layak digunakan. Nilai R^2 sebesar 0,7006 berarti 70,06 persen variasi Indeks Gini dapat dijelaskan oleh kelima variabel, sedangkan *adjusted* R^2 sebesar 0,6108 menunjukkan kontribusi 61,08 persen setelah memperhitungkan derajat bebas. Sisa variasi sebesar 38,92 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti struktur ekonomi daerah, disparitas infrastruktur, alokasi belanja pemerintah daerah, dan variabel makroekonomi lainnya.

Uji Parsial

Secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan (koefisien -0,005865; Prob. 0,0005): setiap penambahan 1.000 jiwa diikuti penurunan Indeks Gini sebesar 0,0059 poin, dengan variabel lain dianggap tetap. Pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,179242; Prob. 0,0000): kenaikan Rp1 juta per bulan diikuti kenaikan Indeks Gini sebesar 0,1792 poin. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,017098; Prob. 0,0290): kenaikan PDRB ADHK sebesar Rp1 triliun diikuti kenaikan Indeks Gini sebesar 0,0171 poin. Adapun RLS (koefisien -0,023010; Prob. 0,3296) dan TPT (koefisien -0,004522; Prob. 0,4481) berarah negatif tetapi tidak signifikan, sehingga keduanya tidak terbukti memengaruhi Indeks Gini secara statistik pada periode penelitian.

Pembahasan Pengaruh Masing-masing Variabel

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Indeks Gini

Koefisien RLS yang negatif sejalan dengan teori modal manusia, yang memandang peningkatan investasi pendidikan sebagai jalan menaikkan produktivitas, membuka akses pekerjaan berupah lebih tinggi, dan menekan ketimpangan (Todaro & Smith, 2012). Namun, ketidaksignifikanannya mengindikasikan kendala struktural dalam pemanfaatan modal manusia di pasar kerja daerah. Rata-rata lama sekolah Jambi baru 8,55-8,95 tahun, artinya mayoritas penduduk berusia 25 tahun ke atas rata-rata baru menamatkan jenjang pendidikan menengah pertama, dan jarak capaian antar a Kota Jambi (11,59 tahun) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (7,71 tahun) masih lebar. Temuan ini mendukung Abdullah et al. (2021) dan Bustos & Arango (2021) dalam hal arah koefisien, sekaligus konsisten dengan Sulistyaningrum et al. (2022) serta Violin & Lutfi (2022) bahwa penambahan kuantitas lama sekolah tidak otomatis menurunkan Indeks Gini tanpa pemerataan mutu pendidikan, penyelarasan keterampilan vokasional (*link and match*), dan perluasan penyerapan tenaga kerja terdidik di pasar kerja formal.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Gini

Pengaruh negatif dan signifikan jumlah penduduk berbeda dari pandangan Malthusian klasik tetapi relevan dengan aglomerasi ekonomi dan bonus demografi. Pertambahan penduduk Jambi yang stabil sekitar 1,04-1,32 persen per tahun memperbesar skala pasar lokal dan mendorong aktivitas ekonomi kerakyatan. Di kabupaten seperti Muaro Jambi, Bungo, dan Merangin, pertambahan penduduk diikuti ekspansi pertanian swadaya, perkebunan rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jasa informal yang menyerap banyak tenaga kerja. Sektor informal dan usaha mikro padat karya ini berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi lapisan bawah sehingga pertumbuhan penduduk tidak memperlebar ketimpangan. Hasil ini memperkuat temuan Aqilah et al. (2024) pada skala Pulau Sumatera dan Walujadi et al. (2022) pada tingkat nasional, serta sejalan dengan argumen Julihanza & Khoirudin (2023) dan Simbolon et al. (2023) bahwa dinamika kependudukan tidak memperlebar kesenjangan selama diimbangi perluasan lapangan kerja berbasis kerakyatan. Temuan ini berbeda dari studi yang melaporkan pengaruh positif jumlah penduduk (Violin & Lutfi, 2022), yang mengisyaratkan bahwa arah efek penduduk sangat bergantung pada konteks daerah.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Gini

Teori makroekonomi memprediksi bahwa pengangguran yang meningkat memperburuk distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini justru menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan, yang dapat dijelaskan oleh karakteristik pasar kerja Jambi. TPT provinsi relatif rendah dan menurun dari 5,13 persen menjadi 4,26 persen, dan angka yang tinggi terkonsentrasi di Kota Jambi (7,08 persen pada 2025) dengan dominasi pengangguran terdidik yang memiliki daya tahan finansial keluarga lebih baik. Di kabupaten, angkatan kerja yang tidak terserap sektor formal masuk ke pertanian rakyat, perkebunan harian, dan perdagangan informal yang menjaga konsumsi dasar keluarga sehingga perubahan TPT tidak langsung menggeser distribusi pengeluaran. Temuan ini sejalan dengan Khaerunnisa & Puspitasari (2023) yang tidak menemukan pengaruh signifikan TPT, serta didukung Ghifara et al. (2022), Fitriyani et al. (2024), dan Bustos & Arango (2021) bahwa hubungan pengangguran dan ketimpangan bergantung pada jaring pengaman sosial dan daya serap sektor informal. Selain itu, TPT tidak menangkap pengangguran terselubung dan kualitas pekerjaan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan pekerja.

Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Gini

Pengaruh positif dan signifikan pengeluaran per kapita mengisyaratkan bahwa pertumbuhan daya beli selama 2020-2025 berlangsung tidak merata. Kenaikan rata-rata pengeluaran dari Rp1.126.690 menjadi Rp1.726.800 lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas, khususnya di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan bukan makanan dan gaya hidup, sementara peningkatan pengeluaran lapisan bawah di kabupaten cenderung terbatas pada kebutuhan pokok. Akibatnya, jarak daya beli antar kelompok melebar secara agregat, sesuai dengan penjelasan teori konsumsi bahwa kelompok atas dan bawah memiliki pola belanja yang berbeda (Aryal & Aryal, 2023). Temuan ini sejalan dengan Falahuddin et al. (2024) yang menemukan indikator per kapita sebagai faktor dominan pelebar ketimpangan, dan didukung oleh Taş (2022), Nugroho & Salsabila (2023), Janah (2022), serta Walujadi et al. (2022) bahwa pertumbuhan pengeluaran yang terkonsentrasi pada strata atas tidak otomatis menciptakan pemerataan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, yang konsisten dengan fase awal hipotesis Kuznets, yakni akselerasi ekonomi pada tahap awal pembangunan diiringi melebarnya disparitas. Penafsiran ini perlu diberi catatan karena pertumbuhan diproksikan dengan level PDRB ADHK dan periode pengamatan hanya enam tahun, sehingga hasil ini belum dapat dipandang sebagai pengujian penuh kurva U-terbalik. Perluasan PDRB Jambi

ditopang sektor padat modal, seperti perkebunan sawit skala besar, industri pengolahan minyak sawit mentah (*crude palm oil*), dan pertambangan batu bara, terutama di Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batang Hari. Karakter tersebut memicu ekonomi enklave: nilai tambah dan keuntungan terkonsentrasi pada pemilik modal, investor, dan tenaga kerja ahli, sedangkan efek tetesan ke bawah bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian tradisional dan usaha informal berjalan lambat. Hasil ini seirama dengan Aqilah et al. (2024), Violin & Lutfi (2022), Nabila & Laut (2021), Walujadi et al. (2022), dan Alamanda (2021), serta dengan Hill (2021) yang menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan tidak otomatis menciptakan pemerataan tanpa kebijakan redistribusi yang tepat sasaran. Berbeda dari temuan tidak signifikan pada Sulistyaningrum et al. (2022) dan Julihanza & Khoirudin (2023), hasil ini menunjukkan bahwa di daerah berbasis sumber daya alam, karakter sektor penopang pertumbuhan menentukan dampak distribusinya.

Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoretis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antar a indikator sosial-ekonomi dan Indeks Gini bersifat kontekstual. Peningkatan pendidikan dan perbaikan pasar kerja belum cukup menekan ketimpangan bila tidak disertai penyerapan tenaga kerja dan pemerataan mutu, sedangkan pertumbuhan dan konsumsi dapat memperlebar ketimpangan bila manfaatnya terkonsentrasi. Secara terapan, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mengarahkan pertumbuhan dari sekadar mengejar target PDRB menuju pertumbuhan inklusif melalui insentif investasi bagi hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan yang melibatkan petani swadaya serta industri pengolahan padat karya di kabupaten (Apriyani, 2022). Kesenjangan daya beli menuntut transfer fiskal dan perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi desil berpendapatan terendah (Khusaini et al., 2024; Sarjito, 2024), didukung stabilisasi harga pangan pokok oleh tim pengendalian inflasi daerah. Peran ekonomi kerakyatan perlu diperkuat melalui pembiayaan terjangkau, pelatihan kewirausahaan, kemudahan perizinan bagi UMKM, dan perbaikan jalan usaha tani. Dalam jangka panjang, penyelarasan kurikulum SMK dan balai latihan kerja dengan kebutuhan industri utama daerah serta pemerataan sarana pendidikan antar a kota dan kabupaten pesisir diperlukan agar peningkatan lama sekolah benar-benar berbuah pekerjaan berupah layak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Selama 2020-2025, indikator sosial-ekonomi di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang membaik. Rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, pengeluaran per kapita, dan PDRB ADHK meningkat, TPT menurun, dan Indeks Gini berada

pada kategori rendah hingga sedang (0,235-0,395) dengan kecenderungan menurun pada 2025, meskipun disparitas antara Kota Jambi dan kabupaten agraris atau pesisir masih lebar. Hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini, pengeluaran per kapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan dengan *adjusted* R^2 sebesar 61,08 persen.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan mentransformasi strategi pembangunan menuju pertumbuhan yang inklusif melalui hilirisasi komoditas padat karya dan kemitraan dengan petani swadaya, memperkuat perlindungan sosial serta transfer fiskal yang tepat sasaran, menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat UMKM dan sektor informal produktif, serta menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan level PDRB ADHK, bukan laju pertumbuhan, jumlah observasi hanya 66 dengan periode enam tahun, dan Indeks Gini berbasis pengeluaran cenderung lebih rendah daripada ketimpangan pendapatan. Hasil FEM juga menggambarkan asosiasi, bukan hubungan kausal. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti dana transfer daerah (DAU/DBH), inflasi daerah, dan realisasi investasi (PMA/PMDN), menggunakan laju pertumbuhan PDRB, memperpanjang periode pengamatan, serta menerapkan ekonometrika spasial untuk menangkap keterkaitan antar wilayah Kabupaten/Kota secara lebih presisi.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, A. T., Sari, D. W., & Purwono, R. (2021). Analysis of the relationship between income inequality and social variables: Evidence from Indonesia. *Economics & Sociology, 14*(1), 103–119. https://doi.org/10.14254/2071-789x.2021/14-1/7

Alamanda, A. (2021). The effect of economic growth on income inequality: Panel data analysis from fifty countries. *Info Artha, 5*(1), 1–10. https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1176

Amaluddin, A., Hanoeboen, B. R. A., & Ramly, A. (2020). Determinan sosial ekonomi kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika, 15*(1), 39–50. https://doi.org/10.22437/jpe.v15i1.9218

Apriyani, D. (2022). What are the leading sectors expected to reduce inequality in South Sumatra Province? *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19*(2), 151–164. https://doi.org/10.29259/jep.v19i2.15221

Aqil, H. M., & Wahyuniati, D. (2022). The effect of human capital inequality on income inequality: Evidence from Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Data Science and Official Statistics, 2021*(1), 358–372. https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i1.63

Aqilah, M. R. Al, Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. *Journal of Law Administration and Social Science, 4*(1), 13–24. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.684

Ariesta, L. C. O. W., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota dan keterkaitan spasial. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1*(5), 737–754. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79

Aryal, A., & Aryal, B. (2023). Income distribution and its effect on food expenditure, non-food expenses and savings in households of a developing economy. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies, 5*(1), 1–15. https://doi.org/10.32996/jefas.2023.5.1.1

Asogwa, F. O., Onyeke, Q. O., Kuma, P. M., Arazu, W. O., & Nkalu, C. N. (2021). Do macroeconomic indicators determine income inequality in selected African countries? *Journal of Public Affairs, 22*(4). https://doi.org/10.1002/pa.2560

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,315* [Berita resmi statistik]. https://jambi.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/03/820/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-315.html

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363* [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html

Bustos, B. A. A., & Arango, D. (2021). Income inequality in Colombia: Reassessing the effects of public spending and education provision. *Semestre Económico, 24*(56), 229–252. https://doi.org/10.22395/seec.v24n56a10

Falahuddin, M. I., Zukhrufah, A. Y., Sitanggang, C. J. R., & Pusponegoro, N. H. (2024). Analisis spasial determinan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics, 2024*(1), 1055–1064. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2147

Farkhan, M. R., & Maryani, E. (2023). Dari keberagaman entitas menjadi ketimpangan multisektor di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12*(3), 593–604. https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.69580

Fitriyani, C., Rusiti, R., Septiavin, Q., & Sari, E. R. (2024). Analisis determinan ketimpangan di Indonesia pada masa Covid-19. *Bappenas Working Papers, 7*(3), 293–307. https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.354

Ghifara, A. S., Iman, A. N., Wardhana, A. K., Rusgianto, S., & Ratnasari, R. T. (2022). The effect of economic growth, government spending, and human development index toward inequality of income distribution in the metropolitan cities in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2*(4), 529–536. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1092

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.

Hidayat, M. (2023). Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera, pendekatan spasial ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 13*(1), 11–18. https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4860

Hill, H. (2021). What's happened to poverty and inequality in Indonesia over half a century? *Asian Development Review, 38*(1), 68–97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158

Hutami, R. Y., & Riani, N. Z. (2022). Peran investasi modal manusia dan modal fisik dalam meningkatkan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 11*(1), 30. https://doi.org/10.24036/ecosains.11813057.00

Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode tahun 2019–2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1*(4), 23–43. https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183

Jhingan, M. L. (2014). *The economics of development and planning*. Vrinda Publications.

Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development, 1*(2), 1–12. https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93

Khaerunnisa, N. O., & Puspitasari, I. F. (2023). Income inequality in West Java 2017–2021. In *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)* (pp. 580–593). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_49

Khusaini, K., Mardisentosa, B., & Putro, T. R. (2024). Fiscal transfer policies and road infrastructure reduce income inequality in rural-urban areas. *Etikonomi, 22*(2), 333–356. https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.28618

Lailani, S., & Maulida, S. P. (2022). Analisis pendapatan dan jumlah penduduk terhadap tingkat konsumsi di Provinsi Aceh. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 1*(1), 31–37. https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8153

Liu, H., Wang, L., Wang, J., He, M., Wu, X., Xu, G., & Zhang, S. (2024). Multidimensional spatial inequality in China and its relationship with economic growth. *Humanities and Social Sciences Communications, 11*(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-03961-y

Lutfiani, D., & Yuniasih, A. F. (2021). Pengaruh disparitas capaian pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2012–2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020*(1), 662–671. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.467

Lyu, J., Zhang, J., & Lamis, D. A. (2025). A worldwide study of the relationship between Gini coefficients and suicide rates. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 22*(7), Article 1110. https://doi.org/10.3390/ijerph22071110

Mardhian, D., Yulianita, A., & Mukhlis, M. (2023). Ketimpangan dan prospek perekonomian di Pulau Sumatera. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 5*(3). https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.612

Nabila, L. M., & Laut, L. T. (2021). Determinan ketimpangan pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2012–2020. *Syntax Idea, 3*(8), 1874–1888. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1410

Ningtiyas, N., & Dwiputri, I. N. (2021). Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015–2019: Analisis regresi data panel. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan, 1*(7), 670–685. https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p670-685

Nugroho, A., & Salsabila, P. G. (2023). Study of economic vulnerability and its influence on the economy in Sumatera Island using the household consumption expenditure approach. *Proceedings of the International Conference on Data Science and Official Statistics*, *2023*(1), 430–445. https://doi.org/10.34123/icdsos.v2023i1.293

Prayitno, A. R. D., & Kusumawardani, D. (2022). Open unemployment rate in the province of East Java. *Journal The Winners, 23*(1), 11–18. https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7047

Restulillah, F. H., & Ariusni, A. (2020). Pengaruh financial development, investasi asing langsung dan urbanisasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 2*(4), 55. https://doi.org/10.24036/jkep.v2i4.13393

Sarjito, A. (2024). Efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6*(2), 1–12. https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90

Sidqiy, A., & Amar, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 9*(1), 48. https://doi.org/10.24036/ecosains.11549957.00

Simbolon, C. M., Nisa, F., Pinem, H. A., Sinaga, D. E. P., Tobing, R. K. L., & Hidayat, N. (2023). Analysis of the influence of poverty, human development index, and population on income inequality in North Sumatra 2018–2022. *Indonesian Journal of Advanced Research, 2*(10). https://doi.org/10.55927/ijar.v2i10.6334

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi teori pengantar* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Sulistyaningrum, B. I., Bhinadi, A., & Astuti, R. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2011–2020. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1*(4), 891–902. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454

Taş, B. (2022). The effect of human capital on income equality: Cross-sectional analysis. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6*(1), 183–199. https://doi.org/10.30561/sinopusd.1085223

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Addison-Wesley.

Utami, A. A., & Zahrudin, Z. (2022). Pengaruh indeks Gini dan laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic), 8*(4), 422. https://doi.org/10.30998/jabe.v8i4.13994

Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dan faktor yang mempengaruhinya tahun 2010–2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti, 2*(1), 227–252. https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740

Walujadi, D., Indupurnahayu, & Endri. (2022). Determinants of income inequality among provinces: Panel data evidence from Indonesia. *Quality – Access to Success, 23*(190). https://doi.org/10.47750/qas/23.190.26

Wijayanti, D., & Putri, I. D. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017–2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 2*(2), 126–134. https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art2

Yulianingdyah, W. N. (2022). Faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian dan Terapan Teori, 26*(1), 36–53. https://doi.org/10.24123/jeb.v26i1.4842